

## **ABSTRAK**

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Setiap perbuatan dan tindakan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sebagai contoh dalam penelitian ini adalah kasus pencurian dengan pemberatan (yang dilakukan pada malam hari), telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dikenakan Pasal 363 ayat (1) dan dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian dan alat bukti yang dipakai oleh jaksa untuk membuktikan dakwaan tunggal dalam perkara pencurian dengan pemberatan dalam putusan perkara Nomor : 190/Pid.B/2019/PN.Pwt, dan untuk mengetahui aspek yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan. Para terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal sudah tepat, karena terdakwa Khanafi Als. Afi Bin Saefudin Nusi dan Darsono Als. Sono Bin Saheni hanya dikenai dengan satu perbuatan saja tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini juga sudah mempertimbangkan aspek Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum.

Kata Kunci : Pembuktian, Dakwaan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencurian.

## ***ABSTRACT***

*Indonesia is a state of law, meaning that all actions taken by every Indonesian community must be based on the laws in force in this country. Every act and action that violates the law will get strict sanctions. As an example in this study is a case of theft by weighting (which was carried out at night), has been regulated in the Criminal Code (KUHP) that is subject to Article 363 paragraph (1) and imposed a maximum of nine years in prison. The purpose of this study is to find out the evidence and evidence used by prosecutors to prove a single indictment in a theft case with a weighting in a case ruling Number: 190 / Pid.B / 2019 / PN.Pwt, and to find out the aspects considered by the Judge in dropping the ruling. This research is a normative juridical research with a legislative approach and a case approach. The data in this study came from secondary data that was systematically compiled and analyzed by qualitative normative methods. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the defendant has been proven to have committed theft by weighting. The defendants by the public prosecutor were charged with a single indictment form is appropriate, because the defendant Khanafi Als. Afi Bin Saefudin Nusi and Darsono Als. Sono Bin Saheni was only charged with one act without being followed by other charges. The judge examining and deciding this case also considered aspects of Certainty, Justice, and Legal Use.*

*Keywords: Proof, Indictment, Judge Judgment, Criminal Theft*

